

Strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Berbasis Ziswa-School Levy Pada Lembaga Pendidikan Islam

(Studi di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso)

Muhammad Abrori

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
muhammadabrory09@gmail.com

Abstrak: *This study aims to describe and explain the implementation of Education Financing Management in MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso, analyze the existing Education Financing Management model based on the Ziswa Madrasah levy (Study at MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso and formulate a conceptual development model of Ziswa-based madrasah levy education financing management. This study studies the existing objectives using qualitative approaches and conceptual development research on education financing based on Ziswa madrasah retribution and conceptual development model of education financing for Ziswa-based madrasah levy management at MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso, Data obtained by direct observation in the field, in-depth interviews and documentation of data analysis techniques is qualitative analysis of interactive models. The results showed that the implementation of education financing management in MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee is very accountable, and has not utilized Ziswa as a source of rich and sustainable education financing.*

Keywords:

Strategy, Financing Model, Madrasah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso, menganalisis model Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang ada berbasis retribusi Madrasah Ziswa (Studi di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso dan merumuskan model pengembangan konseptual manajemen pembiayaan pendidikan retribusi madrasah berbasis Ziswa. Penelitian ini mempelajari tujuan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian pengembangan konseptual pembiayaan pendidikan berbasis retribusi madrasah Ziswa dan model pengembangan konseptual pembiayaan pendidikan pengelolaan retribusi madrasah berbasis Ziswa di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso, data diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan, secara mendalam wawancara dan dokumentasi teknik analisis data adalah analisis kualitatif dari model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pembiayaan pendidikan di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee sangat akuntabel, dan belum memanfaatkan Ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Strategi, Model Pembiayaan, Madrasah

PENDAHULUAN

Pembiayaan Pendidikan (*Financing Of Education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relatif lebih rendah dibandingkan Negara-negara maju (Rifa'i, 2019). Rendahnya pembiayaan di Negara berkembang dibanding dengan Negara maju tersebut tidak saja pada prosentasenya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana public (*public discourse*) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya persoalan ini menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak menemukan jalan keluar (Suwarno, 2020). Untuk konteks Indonesia sebagian besar pembiayaan pendidikan lebih di arahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang efektif masih belum terjangkau, sehingga secara umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi/pengelolaan pendidikan (Rohman, 2010) .

Pendidikan sebagai *human investmen* hingga saat ini di Indonesia masih berkuat dengan persoalan efisiensi, efektifitas, *equality dan equity*. Tidak terkecuali juga dengan madrasah sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah yang sudah diakui sama dengan sekolah (bukan sub sekolah sejak UU Sisdiknas NO 20 Tahun 2003), merekomendasikan pada setiap penyelenggara, pengelola dan administrator pendidikan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan secara efisien. Sedangkan peningkatan efisiensi sistem pendidikan (sistem kecil/madrasah) bisa dilakukan jika sistem pendidikannya melakukan pemanfaatan secara efektif pada tingkat primer maupun sekunder atas fungsi produktivitas administrator sekolah/madrasah (Nugroho et al., 2021). Situasi seperti ini kemudian menghajatkan adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bagi madrasah untuk melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus mampu melayani setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara merata dan setinggi-tingginya (Hadi, 2018)

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah cenderung dikelola dengan manajemen seadanya bahkan dikelola dengan kekurangan sumber daya, satu contoh penyusunan atau perancangan pembiayaan pendidikan yang kurang diperhatikan (Mundiri et al., 2021). Apabila hal itu memang terjadi, berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan organisasi harus segera dicari. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan sistem dan model pembiayaan pendidikan pada sekolah/madrasah. Di pihak lain, hasil penelitian (Zulfa, 2012) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan komponen strategik yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bermutu tidaknya praktek pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komponen pembiayaan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Penjaminan mutu pembiayaan pada sekolah/madrasah termasuk ke dalam salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal terkait dengan mutu. Dalam pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Idealnya persoalan pembiayaan pendidikan yang berujung kepada tidak efektif, tidak efisien dan tidak bermutunya pendidikan di Indonesia semestinya tidak akan muncul, seandainya bisa diminimalisir. Tetapi pada kenyataannya, persoalan tersebut masih banyak muncul. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan atas kondisi real di Indonesia dari berbagai sumber, seperti: masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah walaupun sudah ada kebijakan BOS, BSM dan sebagainya. Masih banyak sekolah/madrasah yang tidak bisa menyediakan sarana prasarana secara memadai (Baharun & Alawiyah, 2018).

Akibat persoalan ini, maka seolah-olah pendidikan di Indonesia masih berkutut dengan persoalan akses pendidikan. Padahal sesuai dengan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional (Renstra Diknas) maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia meliputi: pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Ketiga, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga pilar ini juga berkutut pada persoalan mutu (Abrori, 2023).

Sebenarnya jika kita sejenak menengok sekilas tentang praktek pembiayaan pendidikan masa khilafah sebagaimana pendapat An Nabhani dalam (Farihah, 2014), ternyata pembiayaan pendidikan dimenej oleh Baitul Mal yang kemudian secara garis besar dibelanjakan (*distribution*) untuk 2 kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan pada masa itu berasal dari umat yang dikelola oleh baitul mal. Jika hal ini dilakukan dalam konteks ke-Indonesia-an maka persoalan anggaran pendidikan yang hanya 20% dari APBN bisa teratasi, serta tidak adanya alasan rendahnya mutu pendidikan karena terbatasnya sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditepis, karena hal tersebut bisa di atasi dengan memanfaatkan potensi sumber pembiayaan pendidikan umat islam

di Indonesia yang sangat melimpah seperti dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, dan sedekah.

MD Nurul Amal Suling Kulon di Cermee Bondowoso, sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan), maka sudah sepantasnya tidak lagi berkutat dengan persoalan pembiayaan pendidikan karena bisa memanfaatkan sumber dari ZISWA ditambah juga dalam mengelola dan memanaj pembiayaan pendidikannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan. Sehingga prinsip dari penyelenggaraan untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat bisa diwujudkan oleh madrasah-madrasah yang mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat melalui pengembangan sekolah/madrasah efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik sekaligus krusial untuk dilakukan agar bisa membuka wacana baru tentang potensi ditemukannya sumber pembiayaan pendidikan baru, melimpah, keberlangsungannya tinggi sekaligus dekat dengan masyarakat sehingga mampu memediasi kemandirian madrasah menuju sekolah/madrasah efektif.

KAJIAN TEORI

Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Berbicara konsep manajemen pembiayaan setidaknya berbicara tentang pembiayaan pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan dan fungsi-fungsi (operatif) manajemen pendidikan itu sendiri. Menurut Nanang Fatah pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup; gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Fattah, 2000). Kemudian konsep kedua yaitu konsep manajemen pembiayaan pendidikan atau manajemen keuangan Pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan secara sistematis dan sinergis (Nugroho et al., 2021).

Dalam konsep manajemen pembiayaan pendidikan maka akan muncul konsep fungsi manajemen pembiayaan. Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan keuangan (budgetting) implementasi/pelaksana pengeluaran keuangan (accounting) dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (*auditing*) (Baharun & Alawiyah, 2018). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindak lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan

kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai (Abrori & Muali, 2020).

Konsep School Levy Dalam Pembiayaan Pendidikan

Konsep school levy sebenarnya ditemukan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Amerika. Pengertian umum school levy adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaannya dari pajak (Kranz, 2004:1). Disebut levy karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai school tax levies atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai school levy. Artinya konsep school levy dalam manajemen pembiayaan pendidikan sesungguhnya berbicara dalam konteks sumber-sumber pembiayaan pendidikan (Arifudin et al., 2021).

Informasi tentang school levy juga bisa dilihat dalam ketetapan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan *Wisconsin department of Revenue, Division of Research and Policy* pada 3 Desember 2008, dengan apa yang disebut dengan State School Levies. Produk state school levies dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan *property tax* untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi.

Konsep school levy muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan jumlah pengaturan, sebagai dijelaskan dalam situs web *Department of Revenue Washington State* (2009:1) dalam jurnal (Solehan, 2022) sebagai berikut:

“Pajak properti adalah sumber pendanaan utama untuk public school Washington. Dua jenis pungutan pajak properti mendukung sistem sekolah negeri pungutan sekolah negeri dibayar state oleh semua pemilik properti washington untuk sekolah umum; dan pungutan khusus yang disetujui oleh pemilik untuk wilayah sekolah tertentu. Sedangkan penerima dari pungutan khususnya boleh digunakan untuk distrik sekolah itu, semua dana yang dikumpulkan dari retribusi pajak properti negara disetorkan dalam dana umum negara adlaah uang yang didistribusikan ke distrik sekolah di seluruh negara bagian pada formula yang ditetapkan.”

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikkan, menurut Cagnetti school levy memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti. Kedua, terjadi peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3% akibat inflasi pada tahun sebelumnya. Ketiga, di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, prasekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru. Keempat, gaji menjadi kesepakatan besar atas

perekrutan pajak. Kelima, kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5% sampai 5% per tahun.

Konsep Ziswa dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Jika negara asal konsep School Levy sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia, di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak dialokasikan secara khusus dari awal untuk menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lainnya (Zulfa, 2012). Apalagi dalam khasanah Islam, praktik ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditemukan misalnya pada masa khalifah Islam abad IV H (Musfah, 2012). Bahkan pada masa khalifah Umar dan Ustman, pembiayaan pendidikan seperti untuk memberi gaji kepada guru, muadzin dan imam sholat jama'ah. Diambilkan dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari Hizyah, Kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan harta non muslim yang melintasi tapal batas negara), demikian pendapat Rahman (1995), (Munir, 2013) dalam (Rohman, 2010). Artinya pada masa sahabat sumber pembiayaan pendidikan bisa dari Hizyah, Kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Sehingga tidak heran pada masa abad ke IV H, kekhalifahan Islam telah mampu memberikan pendidikan gratis pada rakyatnya.

Konsep Madrasah Efektif

Madrasah sebagaimana organisasi lain akan disebut sukses dibangun jika madrasah menjadi organisasi yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana organisasi mewujudkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang di capai (Nursobah, 2022). Artinya sekolah akan dikatakan sebagai madrasah efektif apabila madrasah dapat mencapai tujuan-tujuannya melalui aktivitas yang sudah dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu proses pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *in-depht interview* observasi dan dokumentasi dengan tetap mempertahankan keabsahan data. Sehingga pada proses ini menggunakan triangulasi data (Lexy, 2002). Sedangkan untuk memperkaya data dilakukan perpanjangan waktu penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data dengan membuat kodifikasi berdasarkan fokus dan turunannya dari setiap aspek dalam pertanyaan peneliti yang juga didasarkan pada proses penggalan data. Baru setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif interaktif, yang sesungguhnya dilakukan sejak dari awal selama dan setelah penelitian secara interaktif (Arikunto, 2019).

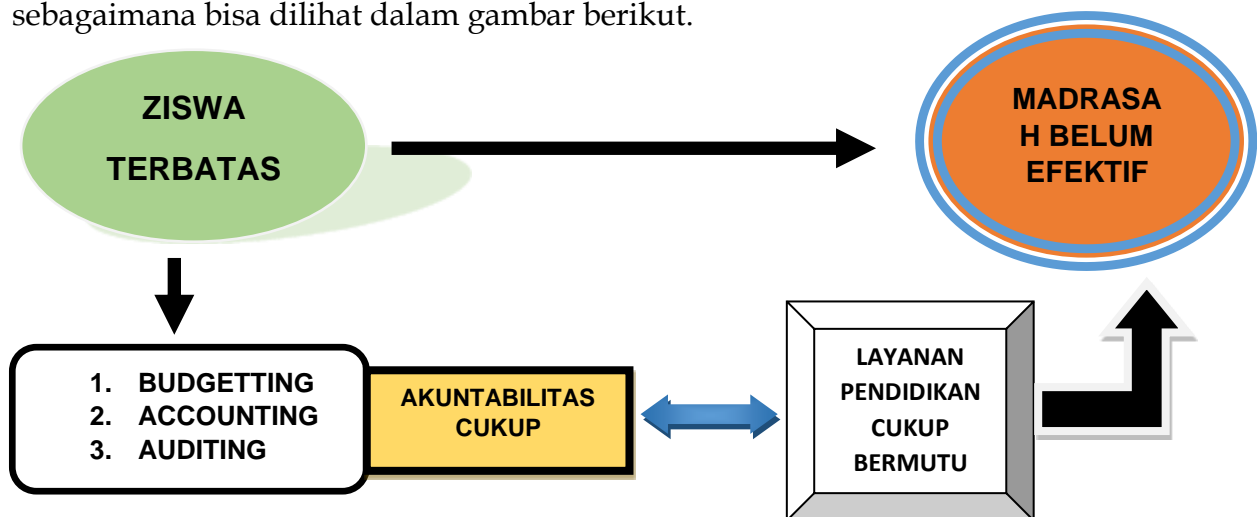
Kemudia selain menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang dipilih adalah R and D yang mengacu pada (Borg & Gall, 1984). Maka penelitian ini memiliki tahapan sebagai berikut: a) Penelitian dan pengumpulan informasi, b)

perencanaan, c) Pengembangan Produk, d) Uji lapangan operasional, i) Uji lapangan akhir, j) Diseminasi dan implementasi (Lexy, 2002:46). Tetapi penelitian ini pengembangan (*development*) yang dilakukan hanya sampai kepada pengembangan produk akhir berupa model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis ziswa-school levy sebagai model manajemen pembiayaan pendidikan. Jadi tidak sampai kepada deminasi dam implementasi mengingat terbatas waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Model

Berdasarkan temua dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka temua model konseptual atas penelitian ini adalah sebagaimana bisa dilihat dalam gambar berikut.



Bagan

Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dari model temua tersebut diperoleh informasi bahwa MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan yang menyebabkan madrasah efektif belum sepenuhnya terwujud. Hal-hal yang dimaksud adalah

1. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan dilaksanakan hanya sampai tingkat "cukup akuntabel"
2. Pelaksanaan fungsi budgeting masih minim sumber dana dan belum memanfaatkan ziswa secara optimal (ziswa terbatas). Padahal sizwa merupakan sumber dana pendidikan yang sangat berlimpah, kaya, dan sustainable.
3. Akibat dari pemanfaatan ziswa yang terbatas, maka layanan pendidikan yang bermutu belum sepenuhnya terwujud (cukup bermutu).
4. Akibat kedua adalah terbentuk madrasah yang belum efektif.

Model Pengembangan Konseptual

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disusun alternatif model konseptual yang bisa ditawarkan, yaitu model manajemen pembiayaan pendidikan

berbasis ziswa berorientasi Madrasah efektif. Model ini dikembangkan dengan melandaskan diri pada teori-pikir empirik.

Landasan pikir pertama berangkat dari teori bahwa pendidikan bermutu akan bisa diberikan kepada peserta didik jika madrasah mampu memenuhi dan mengembangkan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan. Standar mutu pendidikan yang dimaksud adalah 8 standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah (Permendiknas).

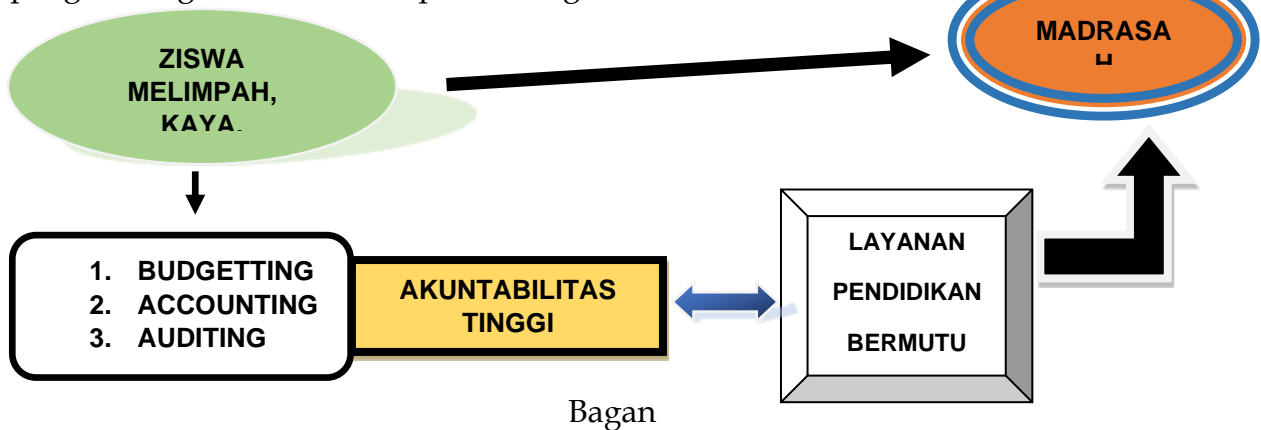
Landasan kedua, salah satu standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan akan bisa berpengaruh terhadap kebermutuan layanan pendidikan jika dimenej dengan baik dan akuntabel. Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dan akuntabel adalah manajemen pembiayaan yang melaksanakan seluruh fungsi secara akuntabel sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Landasan ketiga, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik semestinya memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan berkelanjutan. Idelnya sumber dana (Financing Sources) pembiayaan pendidikan bisa diperoleh melalui pajak (*tax*), APBN, APBD, Grants, kontributor dan loan (pinjaman) atau jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, maka pemerintah daerah (APBD), dan dari masyarakat (baik dari orang tua/walasiswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun baiaya penyelenggaraan pendidikan yang deselenggarakan masyarakat). Mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis umat Islam, maka pengadaan sumber dana bisa memanfaatkan potensi ekonomi umat berupa ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).

Landasan keempat, keefektifan madrasah banyak ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu yang mengacu kepada 8 standar sekaligus diback up oleh sumber dana dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan bermutu. Sehingga berkontribusi bagi naiknya minat belajar (kehadiran siswa lengkap), antusiasme belaaajar tinggi, guru konsisten melaksanakan tugasnya termasuk selalu memberi sekaligus menilai pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sebagai latihan maupun pengayaan, mempertinggi ragam dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler madrasah dan selalu mendapatkan dukungan masyarakat dan orang tua. Dimana ciri-ciri ini merupakan indikator sekolah efektif.

Landasan keelima, landasan empirik dari temuan penelitian tentang praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MD Nurul Amal Suling Kulon cermee Bondowoso yang hanya cukup akuntabel serta sumber dana pendidikan terbatas menyebabkan layanan pendidikan tidak bermutu tinggi, berdampak pada gelar madrasah efektif belumsepenunhnya diraih.

Berdasarkan landasan pikir-teoritik dan empirik maka disusunlah pengembangan model konseptual sebagaimana berikut:



Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif

Sebagai model konseptual yang baru ditawarkan, jelas model ini berupaya untuk mengatasi kelemahan yang ada di lapangan. Sebagaimana temuan penelitian bahwa praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso memiliki dua kelemahan utama yaitu belum akuntabel, belum memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan sustainable dan belum fokus pada manajemen pembiayaan pendidikan yang harus memiliki karakteristik:

1. Seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan harus akuntabel
2. Madrasah harus memiliki sumber dana pendidikan berbasis umat yang kaya, melimpah dan sustainable yaitu berbasis ziswa.
3. Fokus layanan pendidikan yang bermutu berdampak pada pencapaian madrasah efektif.

Ketiga karakteristik yang sekaligus menjadi syarat efektifnya praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu mewujudkan madrasah efektif-madrasah bermutu, merupakan tesis berdasarkan hasil analisis temuan penelitian ini, yaitu:

1. Manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabel akan mempengaruhi terbentuknya layanan pendidikan yang bermutu dan madrasah efektif.
2. Manajemen pembiayaan pendidikan yang memiliki sumber dana kaya, melimpah dan sustainable mampu mempertinggi mutu layanan pendidikan.
3. Mutu layanan pendidikan yang optimal akan berdampak pada predikat madrasah efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa “model manajemen pembiayaan pendidikan di MD Nurul Amal Suling Kulon Cermee Bondowoso berbasis Ziswa-School Levy cukup akuntabel dan belum memanfaatkan ziswa sebagai sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah, dan sustainable.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dikembangkan model konseptual “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif”, yang memiliki tiga karakteristik akuntabel, dumber dana melimpah kaya, dan sustainable serta fokus pada madrasah efektif.

REFERENSI

- Abrori, M., & Muali, C. (2020). *PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>
- Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari, M., & Darul Falah Bondowoso, ah. (2023). *Mutual Relationship : Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat*. 1(2). <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., Sundulusi, C., Darmawati, D., Harahap, E., & Sijabat, D. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Baharun, H., & Alawiyah, S. (2018). Pendidikan Full Day School Dalam Perspektif Epistemologi Muhammad ‘Abid Al-Jabiri. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 1–22.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1984). Educational research: An introduction. *British Journal of Educational Studies*, 32(3).
- Farihah, U. (2014). Sistem ekonomi neoliberalis kapitalisme dalam perspektif nilai-nilai etik Islam. *EKSYAR*, 1(1), 66–74.
- Hadi, A. (2018). Perkembangan dan Konsep Dasar Manajemen Humas dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Historis. *At- Ta’lim : Jurnal Pendidikan*, 4(2), 67–84. <https://doi.org/10.36835/attalim.v4i2.55>
- INDONESIA, P. R. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mundiri, A., Baharun, H., Hamid Wahid, A., Ramadhani, K., Imamah, L., & Zakiyah, U. (2021). *Digital Branding in Increasing Civic Engagement; A Public Relation Strategy in the Battle of Perceptions*. <https://doi.org/10.1080/13602004.20>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta’dib*, 8(2).
- Musfah, J. (2012). *Pendidikan holistik: pendekatan lintas perspektif*. Prenada Media.

- Nugroho, A. G., Nanda, I., Kurniawan, D. D., Irayanti, I., Purba, S., Siregar, T., Prasetyo, D., Rusli, M., Yulistiyono, A., & Ridho, A. (2021). *Mewujudkan Kemandirian Indonesia Melalui Inovasi Dunia Pendidikan* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Nursobah, A. (2022). The Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen ekonomi mandiri pondok pesantren dalam mewujudkan kualitas layanan pendidikan. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 30–44.
- Rohman, A. (2010). *Pendidikan komparatif: menuju ke arah metode perbandingan pendidikan antar negara*. Laksbang Grafika.
- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105.
- Suwarno, K. I. (2020). MANAJEMEN MUTU MADRASAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF JOSEP M. JURAN. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 28–39.
- Zulfa, U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2), 239–254.